

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hadisoepipto, Hartono, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2008)
- Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian bagi Orang Asing di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi penelitian hukum dan jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2009)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Lengkap*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
- Sihombing, Sihar, *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013)
- Sjahriful, Abdullah (James), *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1993)
- Tutik, Titik Triwulan, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Cerdas Pustaka, 2008)
- Wahyudin Ukun, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, (Jakarta: PT. Adi Kencana Aji, 2004)
- Yudha, Bhakti, *Hukum Internasional (Bunga Rampai)*, (Bandung: PT Alumni Bandung, 2003)

Jurnal

- Alan Hasan, "Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Bagi Orang Asing yang Melibihi Batas Waktu Izin Tinggal di Indonesia" *Lex et Societatis*, Vol. III/Nomor 1/Jan-Mar/2015.
- Astrid Ditha F.A, Amalia Diamantina, Amiek Soemarmi, "Pelaksanaan Deportasi Orang Asing di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2011 Tentang Keimigrasian (Studi Kasus Kantor Imigrasi Jakarta Timur)”, *Diponegoro Law Review* vol.5 Nomor2,2016, hlm 2.

Dede Rizky Setiawan, Amalia Diamantina, Amiek Soemarmi, “Tugas dan Wewenang Kantor Imigrasi Kelas II Pati dalam Upaya Perlindungan Tenaga Kerja”, *Diponegoro Law Journal*, Tahun 2017, hlm. 2.

Helga Anton Prayulianda, Antikowati, ”Pengawasan Warga Negara Asing Penerima Bebas Visa Kunjungan dalam Perspektif Hukum Kewarganegaraan”, *Lentera Hukum*, Volume 6-2019, Issue 1 pp,hlm. 142.

Iman Santoso, M,”Peran Keimigrasian dalam Rangka Peningkatan Ekonomi dan Pemeliharaan Ketahanan Nasional Secara Seimbang”, (Tesis Hukum Universitas Krisnadwipayana Jakarta, 2004), hlm 24.

Prayulianda,Helga Anton & Antikowati,”Pengawasan Warga Negara Asing Penerima Bebas Visa Kunjungan dalam Perspektif Hukum Kewarganegaraan”, *Lentera Hukum*, 28 April 2019, hlm.142

Tri Noormawati, Lita Tyesta ALW, Amiek Soemarmi, “Tinjauan Yuridis Pengawasan Imigran Legal Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian”, *Diponegoro Law Review*, 2016, hlm. 2

Warhan Wirasto Suhaidi, Mahmul Siregar, Jelly Leviza, “Pelaksanaan Pengawasan Warga Negara Asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Belawan Berdasarkan Undang-Undang Nomor6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian”, *USU Law Journal*, Vol.4.Nomor1-2016, hlm. 170

Website

<http://jogja.imigrasi.go.id/>

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2006 Tentang Rumah Detensi Imigrasi

Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: F-1002.LK.02.10 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pedetensian